

**ANALISIS PROBLEM PENDIDIKAN DASAR ISLAM DAN RELEVANSINYA
DENGAN PERUMUSAN MATERI POKOK MI**

Oleh: Teuku Hariski Munazar
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: teukuhariski@gmail.com

Abstract

Islamic basic education is a formal initial education program for all Indonesian citizens, every Indonesian citizen is required to have education for nine years. It can be said that the first nine years of schooling of children are referred to as the initial level of basic education. Basic education is not only Elementary School / Madrasah Ibtida'iyah but junior high school / Madrasah Tsanawiyah is also included in the category of basic education, basic education has two types, namely public and private Islamic primary education. During this time educational development has experienced a very acute disorientation in quality and excellence to prepare graduates who are able to manage the knowledge they have acquired. There are many problems that occur in basic Islamic education in Indonesia, ranging from teaching staff, human resources, capacity, facilities and infrastructure, low quality education quality and discriminatory funding problems seen from the provision of unequal funding. Thematic is a government business or program that can reflect the problems of basic Islamic education with the main subject of MI, with thematic learning problems in basic education can be minimized through learning activities that are linked to the daily activities of students. The method used in this research is literature study, in the form of research whose objects are literature works, namely scientific journals, books, articles in the mass media, and statistical data.

Keywords: *Islamic Basic Education, Islamic Basic Education Problems, Main Material MI*

Abstrak

Pendidikan dasar Islam merupakan program pendidikan permulaan yang formal untuk seluruh warga negara Indonesia, setiap warga negara Indonesia wajib mengayam pendidikan selama sembilan tahun. Dapat dikatakan bahwa sembilan tahun pertama masa sekolah anak-anak disebut sebagai pendidikan dasar jenjang awal. Pendidikan dasar tidak hanya Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah saja namun sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah juga termasuk dalam kategori pendidikan dasar, pendidikan dasar memiliki dua macam yaitu pendidikan dasar Islam negeri dan swasta. Selama ini pembangunan pendidikan mengalami disorientasi yang begitu akut dalam mutu dan keunggulan untuk mempersiapkan lulusan yang mampu mengelola ilmu yang telah didapatkan. Banyak problem yang terjadi pada pendidikandi dasar Islam di Indonesia, mulai dari tenaga pendidik, sumber daya manusia, daya tampung, sarana dan prasarana, rendahnya kualitas mutu pendidikan dan masalah pendanaan yang diskriminatif dilihat dari pemberian pendanaan yang tidak merata. Tematik merupakan usaha atau program pemerintah yang dapat merelevansikan problem pendidikan dasar Islam dengan materi pokok MI, dengan pembelajaran tematik problem pendidikan dasar dapat diminimalisir melalui kegiatan belajar yang dihubungkan dengan kegiatan sehari-

hari peserta didik. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan studi Pustaka, berupa penelitian yang objeknya berupa karya-karya kepustakaan yaitu jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistika

Kata Kunci: *Pendidikan Dasar Islam, Problem Pendidikan dasar Islam, Materi Pokok MI*

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan/dijalankan oleh manusia dewasa untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan mempunyai potensi untuk menjadi manusia yang seperti diharapkan. Menelaah dari kegiatan pendidikan dasar di Indonesia, dapat dikatakan bahwa pendidikan islam telah berperan banyak dalam konteks mencerdaskan anak bangsa, hal tersebut menyebabkan masuknya pendidikan islam dalam subsistem pendidikan nasional. Hakekat dari pendidikan dasar Islam adalah membentuk manusia ke arah sesuatu yang dicita-citakan oleh Islam dengan mewariskan budaya hingga mengembangkan budaya tersebut baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Arief Furchan (2004: 3) bahwa “pendidikan merupakan upaya mewariskan budaya serta lmu pengetahuan dan ketrampilan”.¹

Pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang pesat ditandai dengan adanya sekolah Islam dan Madrasah atau sekolah negeri hingga swasta. Salah satu perkembangan yang paling mencolok ialah munculnya berbagai lembaga pendidikan islam seperti pesantren, Sekolah Elite Muslim (SEM) dan juga Sekolah Islam Terpadu (SIT).² Pendidikan dasar Islam merupakan program pendidikan permulaan yang formal untuk seluruh warga negara Indonesia, setiap warga negara Indonesia wajib mengayam pendidikan selama sembilan tahun. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sembilan tahun pertama masa sekolah anak-anak disebut sebagai pendidikan dasar jenjang awal.

Secara sederhana bila dilihat dari konsep pendidikan normal pendidikan dasar adalah pendidikan yang berada di level dasar, berupa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah, namun bila ditinjau dari aturan wajib mengayam pendidikan dasar selama sembilan tahun maka yang termasuk pendidikan dasar tidak hanya Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah saja tetapi sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah termasuk dalam kategori pendidikan dasar.³

Lembaga pendidikan merupakan salah satu pengantar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan anak bangsa dan mempunyai potensi dalam bidangnya, namun yang terjadi pada saat ini lembaga pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada

¹ Arief Furchan, *Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia Anatomi Keberadaan Madrasah Dan PTAI*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hal. 3.

² Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Media Milenium III*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 80-87.

³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam...*, hal. 80-87.

ukuran perluasan dan daya tampung peserta didik dan berbagai macam permasalahan lainnya.

Hingga saat ini pendidikan dasar Indonesia masih mengalami problem yang cukup kronis dalam bidang pendidikan Nasional, secara umum permasalahan yang paling menonjol dalam pendidikan Islam di Indonesia, yaitu perlakuan diskriminatif yang ditandai dengan pemberian anggaran sekolah yang tidak merata.⁴

Relevansi problem pendanaan pendidikan dasar Islam terkait materi pokok MI sangat berpengaruh terhadap hasil apa yang akan didapatkan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dengan demikian pemerintah berperan penting dalam menyelesaikan problem tersebut melalui pemberian layanan pendidikan dasar yang berkualitas yaitu merata, berkeadilan dan bermutu serta relevan dengan pengembangan materi pokok MI.

Pembahasan pada makalah ini, didalamnya memuat tentang analisis problem pendidikan dasar Islam dan relevansinya dengan perumusan materi pokok MI. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yakni untuk mengetahui macam-macam karakteristik lembaga pendidikan dasar Islam yang ada di Indonesia, untuk mengetahui problem-problem apa saja yang mempengaruhi pendidikan dasar Islam di Indonesia, serta mengetahui relevansi problem pendidikan dasar Islam dalam kajian pengembangan materi pokok MI.

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan studi Pustaka, berupa penelitian yang objeknya berupa karya-karya kepustakaan yaitu jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistika. Kepustakaan yang didapatkan akan digunakan sebagai alternatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis mengenai analisis problem pendidikan dasar Islam dan relevansinya dengan perumusan materi pokok MI. Setelah itu dilanjutkan dengan menelaah macam-macam karakteristik lembaga pendidikan dasar Islam yang ada di Indonesia, untuk mengetahui problem-problem apa saja yang mempengaruhi pendidikan dasar Islam di Indonesia, serta mengetahui relevansi problem pendidikan dasar Islam dalam kajian pengembangan materi pokok MI. Adapun sifat dari studi yang dilakukan adalah deskriptif analitis yaitu

⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam...*, hal. 98.”

memberikan edukasi dan pemahaman kepada pembaca, serta jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

B. Pembahasan

Kebijakan dan Macam-macam Karakteristik Lembaga Pendidikan Dasar Islam di Indonesia.

1. Kebijakan Pendidikan Dasar

Pendidikan Islam di Indonesia sudah diakui eksistensinya oleh sejarah, sebelum penjajahan terjadi lembaga pendidikan Islam sudah dikenal oleh penduduk nusantara seperti lembaga pendidikan surau atau pesantren. Pendidikan islam terus beradaptasi sesuai perkembangan zaman dan mengambil tatacara pendidikan modern sehingga pendidikan islam tidak tertinggal. Maka, timbullah berbagai bentuk lembaga pendidikan Islam berupa sekolah Islam seperti pesantren dan madrasah negeri atau swasta.⁵

Prasojo dalam arwildayanto (2018: 14). Kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan atau pertimbangan yang didasarkan pada nilai dan beberapa sistem faktor yang bersifat situasional, kebijakan pendidikan menjadi faktor utama yang dapat menjadi kunci bagi kesuksesan/keunggulan dan eksistensi atau kualitas negara dalam kompetensi global. Dengan demikian kebijakan pendidikan perlu adanya mendapat prioritas utama untuk dikembangkan dan dikaji secara kritis dan komprehensif.⁶

Setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31. Undang-undang tersebut memiliki pesan yang sangat luar biasa bahwa setiap masyarakat Indonesia wajib untuk mendapatkan pendidikan, sudah kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk sangat berperan dalam menyediakan akses serta kesempatan belajar.⁷

Dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat (2). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.⁸Sejarah pendidikan Indonesia memperlihatkan pengembangan pendidikan yang sangat esktrim dilihat dari

⁵ Arief Furchan, *Transformasi Pendidikan...*, hal. 15.

⁶ Arwildayanto, Arifin Sukung, dan Warni Tune Sumar, *Analisi Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, Dan Aplikatif* (Jakarta: CV Cendekia Press, 2018), hal. 12.

⁷ Wildayanto, Arifin..., hal. 22.

⁸ UU SIDIKNAS dan UU BHP, "Ringkasan Permohonan Perkara", diunduh dari <http://mkri.id/index.php?page=download.Resume&id=259> pada Tanggal 21 Februari 2020.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional memberikan wewenang otoritas pendidikan pada daerah, Undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional tersebut mengamanatkan yaitu:

- a. Seluruh warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengayam pendidikan dasar.
- b. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin berlangsungnya wajib belajar sembilan tahun yaitu pendidikan dasar tanpa adanya pemungutan biaya.
- c. Dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar selama sembilan tahun merupakan tanggung jawab bangsa/negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.⁹
- d. Berdasarkan amanat dari undang-undang diatas yaitu setiap pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk memberikan layanan pendidikan selama sembilan tahun atau tingkat pendidikan dasar pada setiap peserta didik. Pemerintahan telah menjamin berlangsungny pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun tanpa adanya pemungutan biaya, dan keberlangsungan pendidikan dasar sembilan tahun yang dijalani oleh peserta didik merupakan tanggung jawab negara.

2. Ruang Lingkup Pendidikan Dasar Islam

Secara sederhana bila dilihat dari konsep pendidikan normal pendidikan dasar adalah pendidikan yang berada di level dasar, berupa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah dan lembaga pendidikan yang sederajat, namun bila ditinjau dari aturan wajib mengayam pendidikan dasar selama sembilan tahun maka yang termasuk dalam pendidikan dasar tidak hanya Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah saja tetapi sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan lembaga pendidikan sederajat termasuk dalam kategori pendidikan dasar.

Pendidikan dasar adalah pendidikan diselenggarakan selama 9 tahun yaitu mencakup program belajar 6 tahun yang terlaksana pada SD/MI dan lembaga pendidikan yang sederajat, kemudian program belajar 3 tahun yang diselenggarakan di SMP/MTSN

⁹ Syamsu Nahar dan Edi Saputra, "Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan (9) Tahun Pada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Di Mandailing Natal," *Edu Religia*, Vol. 1, No. 3 (September 2017).

dan lembaga pendidikan yang sederajat. Oleh karena itu SMP/MTSN merupakan bagian dari pendidikan dasar yang tidak terpisah dari pendidikan dasar SD/MI.

3. Macam-macam Karakteristik Lembaga Pendidikan Dasar di Indonesia

Jalur dari pendidikan dasar terdiri dari beberapa lembaga yaitu pendidikan formal, non formal dan informal, meskipun banyak lembaga pendidikan yang ada di Indonesia pemerintah tetap memberikan wewenang kepada setiap warga negara atau peserta didik berhak memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan kemampuan, minat, bakat serta kondisi mereka masing-masing. Berikut perbedaan jalur pendidikan:

Tabel 1.1¹⁰

Pendidikan Formal	Pendidikan Non Formal	Pendidikan Informal
Adanya lokasi atau tempat khusus	Pembelajaran tidak harus berlangsung didalam gedung	Pembelajaran dapat berlangsung dimana saja
Adanya persyaratan yang dikhususkan untuk menjadi peserta didik	Tidak membutuhkan suatu persyaratan yang khusus	Tanpa memiliki persyaratan formal
Kurikulum yang jelas	Biasanya tidak memiliki suatu jenjang pendidikan yang begitu jelas	Tidak adanya jenjang pendidikan
Materi pelajaran yang akademis	Ada program tertentu yang akan diraih	tidak memiliki rencana yang formal
Proses pendidikan memilik jangka waktu yang telah ditentukan dan lama	Bersifat spesifik dan praktis	Tidak memiliki materi yang ditentukan
Adanya ujian yang bersifat formal	Pendidikannya tidak berlangsung lama atau singkat	Tidak ada ujian
Penyelenggara pendidikan berasal dari pemerintah dan swasta	Terkadang di selenggarakan ujian	Tidak diselenggarakan oleh lembaga formal

¹⁰ Ni Ayu, Anjuman Zukhri, dan Ketut Dunia, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar Di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013," *Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 1, (2014).

Adanya kualifikasi tertentu untuk tenaga pengajar	Dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta	
Dilaksanakan dengan adanya administrasi yang tertib dan terencana		

Pendidikan formal ialah suatu sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan berupa sekolah-sekolah pada umumnya, pada pendidikan formal didalamnya terdapat kegiatan yang terstruktur, sistematis, berjenjang, bertingkat dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan bagi setiap masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan diluar pendidikan formal yang berfungsi sebagai penambah, pelengkap dari pendidikan formal dalam rangka meningkatkan atau pengganti dan mendukung kualitas pendidikan. Kemudian pendidikan informal yaitu suatu pendidikan yang berada disamping pendidikan formal dan non formal yakni pendidikan yang didapatkan melalui kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia.¹¹

Agar dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan perlu adanya suatu lembaga pendidikan seperti sekolah, yang merupakan suatu lembaga pendidikan yang dirancang guna membelajarkan peserta didik. Lembaga pendidikan dasar di Indonesia memiliki dua karakteristik yaitu lembaga pendidikan dasar negeri dan juga lembaga pendidikan dasar swasta. Berikut penjelasan mengenai lembaga pendidikan dasar negeri dan swasta:

a. Lembaga Pendidikan Dasar Negeri

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dinamakan sebagai sekolah negeri, sekolah negeri dijalankan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan pendidikan murni. Dilihat dari segi tenaga kependidikan dan pendidik sekolah dasar negeri mayoritas pegawainya merupakan pegawai negeri¹² Lembaga Pendidikan dasar Islam negeri ini

¹¹ Nahar dan Saputra, "Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan (9) Tahun Pada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Di Mandailing Natal", *Edu Religia*, Vol. 1, No. 3 (September 2017)."

¹² Yoyok Eko Susono dan Fifuka Dwi Khori, "Perbedaan Persepsi Antara Siswa Sekolah Negeri Dan Swasta Terhadap Pembelajaran Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan (Studi Pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Ngawi dengan SMP Ma'arif Ngawi)", *Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan*, Vol. 1, No. 1 (2013).

mencakup Madrasah Ibtidaiyyah (MIN) dan Madrasah Tsanawiyah (MTSN).

b. Lembaga Pendidikan Dasar Swasta

Pendidikan dasar swasta atau sekolah swasta disebut sebagai sekolah independen, pemerintah tidak mengelola sekolah tersebut, lembaga pendidikan dasar swasta ini memiliki wewenang atau hak dalam menyeleksi setiap siswa yang ingin masuk disekolah tersebut dan biaya sekolah secara keseluruhan dibebankan pada siswa. Dilihat dari segi tenaga pendidik dan kependidikan mayoritas pegawai dari sekolah swasta merupakan tenaga honorer. Lembaga Pendidikan dasar Islam Swasta ini mencakup pesantren dan sekolah swasta Islam lainnya. Sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta ialah jenjang pendidikan dasar Islam yang posisinya menduduki posisi strategis dan penentu utama untuk membentuk pemahaman literasi peserta didik. Secara umum pendidikan dasar negeri dan swasta memiliki beberapa perbedaan meliputi iuran SPP, fasilitas atau sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan.

4. Analisis Problem Pendidikan Dasar Islam di Indonesia Secara Umum

Pendidikan dasar Islam merupakan penghantar pencapaian misi pemerintah dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang dapat berperan sebagai pembangun agama dan bangsa, serta menyiapkan peserta didik yang mampu menghadapi tantangan masa depan sehingga mampu menentukan arah perkembangan negara sesuai dengan zaman yang sedang berlaku. Sebaliknya, kegagalan pendidikan dasar dalam menyiapkan peserta didik menghadapi perkembangan zaman akan menghasilkan kegagalan atau penghambat misi yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Agar negara terus berkembang sehingga menjadi negara maju perlu adanya usaha peningkatan mutu pendidikan sehingga negara tidak hanya pada status bangsa yang sedang berkembang tetapi dapat menyandang predikat negara maju yang tidak kalah dengan negara maju lainnya.¹³ Namun banyak problem yang terjadi pada pendidikandi dasar Islam di Indonesia, mulai dari tenaga pendidik, sumber daya manusia, daya

¹³ Joko Susilo, *Pembodohan Siswa Tersistematis* (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2010), hal. 13.

tampung, sarana dan prasarana, rendahnya kualitas, mutu pendidikan, kebijakan pimpinan dan lain-lain.¹⁴

Menurut banyak pengamat pendidikan dasar Islam amat memprihatinkan, kualitas pendidikan dasar Islam sering dibawah standar dan kurang bermutu. Berikut penjelasan mengenai problem pendidikan dasar Islam di Indonesia:

- a. Pengembangan pendidikan dasar lebih memprioritaskan pada aspek peningkatan sumber daya dan sarana prasana yang tujuannya agar dapat menampung peserta didik yang jumlahnya semakin meningkat dilihat dari angka partisipasi pendidikan. Dengan memprioritaskan indikator perluasan pendidikan yang berlebihan telah melengserkan misi pendidikan yang jauh lebih penting, yaitu mewujudkan wajib belajar pendidikan yang bermutu, adil dan bebas biaya.¹⁵

Dampak dari program perluasan pendidikan yang telah dilakukan sejak pada awal tahun 1970, Indonesia berhasil meraih kenaikan jumlah peserta didik sebanyak lebih dari 95% pada tahun 1990. Indonesia berhasil menyelenggarakan program perluasan pendidikan dalam waktu tiga dasawarsa, atas dasar keberhasilan tersebut presiden Soeharto memperoleh penghargaan Medali Avisena dari UNESCO pada tahun 1993.¹⁶

Bukti penghargaan tersebut dianggap sebagai pencapaian keberhasilan dalam perluasan pendidikan. maka seharusnya sejak awal abad ke-21

Kementerian Pendidikan telah mengubah arah indikator kunci keberhasilan pendidikan, dengan menekankan pada aspek strategi pembangunan pendidikan yang merupakan kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar.¹⁷

Peningkatan pendidikan yang selama ini lebih pada berorientasi pada perluasan daya tampung partisipan pendidikan mengakibatkan rendahnya

¹⁴ Musrifah Musrifah, "Analisis Kritis Permasalahan Pendidikan Islam Indonesia di Era Global," *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 3, No. 1 (12 Februari 2019).

¹⁵ TIM PGRI, *Pendidikan Untuk Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan Untuk Perubahan Mental Bangsa* (Jakarta: Kompas, 2014), hal. 63-65.

¹⁶ TIM PGRI, *Pendidikan...*, hal. 6.

¹⁷ Kemendikbud, "Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2010-2014," (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kemdikbud, 2010).

kontribusi terhadap peningkatan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik.¹⁸

b. Rendahnya setiap mutu proses pengelolaan proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan, dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1) Proses pembelajaran yang kurang efektif

Efektivitas suatu kegiatan pembelajaran tergantung sejauh mana perencanaan pembelajaran tersebut dapat terlaksana, dalam dunia pendidikan efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari sejauh mana guru dapat mengelola proses pembelajaran.¹⁹ Namun yang terjadi pada saat ini proses pembelajaran kurang efektif dikarenakan penyampaian materi oleh guru cenderung konvensional, guru cenderung menggunakan metode ceramah dan juga tanya jawab pada proses pembelajaran sehingga siswa kurang aktif dan mudah bosan ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan kurikulum 2013 yang memfokuskan ketika proses pembelajaran berlangsung peserta dituntut untuk lebih aktif dan kreatif.

2) Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor berhasilnya tujuan pendidikan adalah sarana prasarana. Sarana dan prasarana seperti media pembelajaran, perpustakaan, gedung sekolah yang layak, mesjid atau mushalla, serta tempat olah raga adalah bagian penting yang perlu disiapkan dengan cermat dan berkesinambungan di setiap lembaga pendidikan, sehingga dapat menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar. Namun yang terjadi masih banyak lembaga pendidikan yang belum mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dengan baik, bahkan ada sekolah yang sarana dan prasarana masih kurang memadai.²⁰

¹⁸ TIM PGRI, *Pendidikan Untuk...*, hal. 64.

¹⁹ Razali M Thaib dan Irman Siswanto, "Inovasi Kurikulum Dalam Pengembangan Pendidikan (Suatu Analisis Implementatif)," *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, Vol. 1, No. 2 (7 Juli 2015).

²⁰ Dewi Apriana, "Problematika Guru Dari Aspek Ketersediaan Sarana Prasarana Menghadapi Era Standarisasi Pendidikan Nasional," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang*, Vol. 2, No. 1 (2017).

c. Sistem zonasi

Sistem zonasi merupakan sistem pendidikan yang memprioritaskan peserta didik mendapatkan sekolah sesuai dengan daerah tempat tinggal masing-masing, dengan demikian kelebihan sistem zonasi dapat mempermudah peserta didik untuk pergi ke sekolah apabila rumah mereka dekat dengan sekolah.

Sistem zonasi yaitu sistem yang menetapkan/mengharuskan setiap sekolah menerima 90% calon peserta didik yang berdomisili di zona terdekat dengan sekolah. Dengan diterapkan sistem zonasi penerimaan siswa baru diseleksi melalui nilai hanya 25% saja, dan 75% dinilai dari daerah tempat tinggal peserta didik.²¹ Permasalahan yang terjadi akibat program sistem zonasi tidak dapat dipungkiri, diantaranya adalah:

- 1) Sekolah yang awalnya kekurangan peserta didik menjadi kelebihan peserta didik, sedangkan sekolah yang awalnya memiliki jumlah siswa yang banyak menjadi kurang peserta didik.
- 2) Semua sekolah dianggap sama sehingga bisa dikatakan sekolah favorit hilang eksistensinya dalam bidang pendidikan, dengan demikian tidak ada lagi sekolah yang dapat dijadikan contoh atau sekolah model.

d. Pengelolaan manajemen pendidikan yang kurang baik.²²

Diantara permasalahan yang paling mendasar adalah guru, upaya pemerintah dalam mengelola kualitas guru republik Indonesia belum dapat mencapai hasil yang mengembuskan dikarenakan deretan masalah guru masih sangat banyak.²³

Persoalan sertifikasi guru yang dinilai dari jumlah penerimaan sertifikat jauh lebih besar ketimbang keutamaan mutu profesi guru itu sendiri.²⁴ Seringnya terjadi kekeliruan dalam pemanggilan peserta sertifikasi guru seperti guru yang belum terlalu mengajar atau belum lama mengajar sudah

²¹ Nurlailiyah, "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa Smp Di Yogyakarta", *Realita*, Vol. 17, No. 1, (Januari 2019)

²² TIM PGRI, *Pendidikan Untuk...*, hal. 50.

²³ Jejen Musfah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 47.

²⁴ TIM PGRI, *Pendidikan Untuk...*, hal.66

mendapatkan panggilan, sedangkan guru yang sudah lama dalam mengajar tak kunjung mendapat panggilan sertifikasi.²⁵

Permasalahan manajemen sekolah yang kurang bermutu juga disebabkan oleh kepala sekolah, konsep persyaratan menjadi kepala sekolah yang dipandang melalui guru yang diberi tugas tambahan menjadikan profesionalisme dianggap semakin kurang penting dalam pengangkatan kepala sekolah.²⁶

Masalah mendasar dari beberapa persoalan diatas terjadi karena pendidikan terlalu berorientasi pada potensi akademik dan pemerintah meutamakan kepentingan jangka pendek ketimbang misi pendidikan yang berjangka panjang. Selama ini pembangunan pendidikan mengalami disorientasi yang begitu akut dalam mutu dan keunggulan untuk mempersiapkan lulusan yang mampu mengelola ilmu yang telah didapatkan, dikarenakan peserta didik dianggap telah berhasil hanya jika telah menguasai uji kognitif.²⁷

Sejumlah persoalan pendidikan dasar seolah-olah tidak pernah selesai bahkan ada yang semakin memburuk karena pengelolaan sistem pendidikan yang tidak dilandaskan pada keahlian, para pengelola pendidikan yang tidak profesional dan tidak ahli tentu akan menghasilkan kebijakan pendidikan yang buruk dan kurang bermutu Pendidikan yang tidak berkualitas tidak mampu melahirkan lulusan yang berkepotensi tinggi, memelihara, mengelola, menggali, hingga mengembangkan.

2. Problem Pendanaan Pendidikan Dasar Islam di Indonesia

a. Pendanaan Madrasah

Persoalan Pendidikan di Indonesia begitu pelik dan kompleks. Begitu banyak permasalahan Pendidikan yang apabila dikaji harus secara cermat, bukan hanya dari segi kualitas dan kuantitas, namun perlu juga adanya dukungan dari sarana pembelajaran. Anggaran untuk Pendidikan dasar Islam termasuk permasalahan pendidikan yang cukup memprihatinkan.

²⁵ Jejen Musfah, *Analisis Kebijakan...*, hal.48.

²⁶ TIM PGRI, *Pendidikan Untuk...*, hal. 66.

²⁷ TIM PGRI, *Pendidikan Untuk...*, hal. 63.

Perlakuan diskriminatif yang ditandai dengan pemberian anggaran sekolah yang tidak merata. Jika membahas tentang pendidikan dasar Islam tentu saja semua orang akan berfikir kepada suatu lembaga pendidikan yaitu madrasah. Madrasah tunduk pada Kementrian Agama, yang perlu diketahui bahwa Kementrian Agama adalah instansi yang tidak termasuk didesentralisasikan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian madrasah tidak menerima anggaran rutin dari pemerintah daerah dan DPRD, termasuk tambahan insentif untuk guru madrasah.²⁸

Pemerintah selama ini cenderung mengesampingkan Pendidikan Islam dan memperlakukan Pendidikan Islam sebagai anak tiri, khususnya pada persoalan dana. Katakan saja, alokasi dana yang diberikan pemerintah terhadap Pendidikan Islam sangatlah jauh berbeda dengan Pendidikan yang berada dalam naungan Diknas.²⁹

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia dilakukan secara dualism, yakni Kemendikbud sebagai penyelenggara Pendidikan umum atau sekolah sedangkan Kemenag sebagai penyelenggara madrasah. Pada era Otonomi daerah pendidikan merupakan bidang yang termasuk dalam didesentralisasikan, maka konsekuensinya pengelolaan anggaran madrasah tetap terpusat hingga saat ini. Persoalan ini menjadikan kedudukan madrasah menjadi serba tanggung yang tetap dikelola oleh pusat, sementara sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kemendikbud didesentralisasikan pengelolaannya, dengan demikian madrasah tidak diperhitungkan oleh pemda kabupaten/kota karena dianggap pemerolehan dana telah didapatkan dari pemerintah pusat melalui jalur Kanwil dan Kandepag.

Efek dari desentralisasi Pendidikan ini menyebabkan polarisasi antara sekolah dengan madrasah. Dampak dari persoalan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara guru sekolah dengan guru madrasah. Kesejahteraan tambahan dari pemerintah daerah didapatkan oleh guru-guru sekolah, sedangkan guru-guru madrasah sama sekali tidak

²⁸Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam...*, hal. 98.

²⁹Sanaky, "Permasalahan dan Penataan Pendidikan Islam Menuju Pendidikan yang Bermutu, *El-Tarbawi*, Vol. 1, No. 1 (2018)."

mendapatkan bantuan kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah tidak mau memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk apapun kepada madrasah atau instansi yang dianggap dibawah naungan binaan Kemenag.³⁰

b. Besaran Prosentasi Tanggung Jawab Kemenag Terhadap Pendidikan Dasar Islam

Menurut catatan Kemenag jumlah lembaga pendidikan madrasah di Indonesia tidak kurang dari 18% dari seluruh lembaga pendidikan. Sedangkan besaran dari prosentasi tanggung jawab Kementerian Agama dalam penuntasan wajar Dikdas secara Nasional dihitung berdasarkan proporsi siswa yang terdaftar sebagai pelajar di madrasah dan salafiyah dibagi jumlah peserta didik yang tertampung disekolah, madrasah, paket, salafiyah, sekolah terbuka dikalikan 100%, maka proporsi tanggung jawab Kemenag secara Nasional untuk MI adalah 9,77% dan untuk MTs 20,38%. Peningkatan terjadi pada tahun 2016 APK MI telah mencapai 12,93%, dilanjutkan dengan MTs mencapai angka 23,54% dan MA mencapai angka 9,75%.

Proporsi tanggungan jawab Kemenag memang lebih kecil dari proporsi tanggung jawab Kemendikbud, namun persoalan pembiayaan/pendanaan telah menjadi masalah madrasah dikarenakan persoalan penggalan dana yang terbatas sumbernya.³¹

Melihat problem diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kemenag memiliki dan Pendidikan yang sangat terbatas sementara jumlah madrasah sangat banyak, dengan demikian maka sewajarnya mutu dari Pendidikan Dasar Islam masi jauh dari harapan, apalagi Kemenag belum berupaya serius dalam membenahi mutu Pendidikan Madrasah.

Memang dasa warsa akhir-akhir ini sudah tampak adanya Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terutama dengan adanya dana BOS. Setelah adanya kebijakan nasional pemberian dana BOS untuk seluruh siswa yang berada pada usia wajin belajar Pendidikan dasar Indonesia, madrasah tidak diperbolehkan

³⁰ Asep Rahman, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (Penelitian si MTs SA Syifaurrehman Tasikmalaya), *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2019).”

³¹ Asep Rahman

lagi untuk menarik dana dari siswa. Padahal sebelumnya sumber dana Pendidikan madrasah didapatkan dari beragam donator, tidak hanya dari pemerintah melainkan dari keluarga siswa, Yayasan dan masyarakat. Walaupun program BOS telah dijalankan namun hal ini belum maksimal hasilnya.

c. Relevansi Problem Pendidikan Dasar Islam Dalam Kajian Pengembangan Materi Pokok MI

Relevansi problem pendidikan dasar Islam terkait materi pokok MI sangat berpengaruh terhadap bagaimana hasil yang akan didapatkan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dengan demikian pemerintah berperan penting dalam menyelesaikan problem tersebut melalui pemberian layanan pendidikan dasar yang berkualitas yaitu merata, berkeadilan dan bermutu serta relevan dengan pengembangan materi pokok MI. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang khusus untuk pendidikan dasar, berupa konsep pembelajaran tematik integratif. Konsep tersebut diharapkan dan diyakini mampu menjadi salah satu solusi untuk problem pendidikan dasar Islam.

Tematik merupakan pengantar pengembangan materi pokok MI dan beberapa point diatas merupakan bagian dari tujuan tematik yang mengarahkan pengembangan materi pokok MI melalui kehidupan sehari-hari peserta didik dan diharapkan dapat meminimalisir problem pendidikan dasar Islam di Indonesia.

Untuk menjawab relevansi problem pendidikan dasar Islam dalam kajian pengembangan materi pokok MI perlu dijelaskan bahwa, walaupun banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dasar Islam semua itu disebabkan oleh permasalahan yang paling mendasar, yaitu banyak kebijakan pemerintah yang mengutamakan kepentingan jangka pendek ketimbang misi pendidikan yang berjangka panjang.³² Pemerintah dan lembaga pendidikan harus berpikir kritis, mengelola program pendidikan dengan baik, sehingga pendidikan dasar Islam menjadi lebih bermutu dan berfungsi sebagai sarana pembudayaan dan pemberdayaan.

³² TIM PGRI, *Pendidikan Untuk...*, hal..70.

Keanekaragaman bidang Pendidikan telah ditawarkan pada masyarakat Indonesia, masyarakat tinggal memilih melalui arah mana guna menempuh Pendidikan tersebut. Selama tiga dekade terakhir ini, dunia Pendidikan Indonesia telah berkembang dengan cepat secara kuantitatif. Namun perkembangan Pendidikan tersebut tidak diikuti dengan kualitas perkembangan Pendidikan yang sepadana.

Faktor rendahnya relevansi materi pokok Pendidikan dasar Islam di Indonesia adalah karena mulai dari lemahnya tenaga pendidik, sumber daya manusia, daya tampung, sarana dan prasarana, rendahnya kualitas dan mutu pendidikan, kebijakan pimpinan dan lain-lain. Namun Adapun permasalahan yang paling mencolok dan menjadi faktor penentu suksesnya Pendidikan dasar Islam di Indonesia yaitu pendanaan.

Relevansi setiap materi pokok yang ada pada Pendidikan dasar Islam harusnya secara keseluruhan ditata dengan rapi mulai dari hal-hal apa yang dibutuhkan mengenai materi tersebut, sehingga Pendidikan dapat sesuai dengan perkembangan dan pembangunan zaman. Masalah relevansi problem pendidikan dasar Islam di Indonesia terlihat dari banyaknya lulusan dari suatu pendidikan tertentu tidak siap dalam secara kognitif maupun teknik.

- 1) Hal yang dapat dilakukan agar problem pendidikan tersebut dapat berjalan sesuai yang diinginkan dan relevan dengan materi pokok MI yaitu :
 - a) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik pada setiap lembaga pendidikan dasar Islam. Diperlukan penyeleksian yang ketat dan tepat guna memperoleh seorang tenaga pendidik/guru yang berkompeten dan berkualitas tinggi.
 - b) Sarana prasarana pendidikan yang memadai, agar tujuan penyampaian materi dari pelajaran dapat tersampaikan dengan baik.
 - c) Sistem pendidikan yang tepat dan jelas tujuan apa yang ingin dicapai.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan makalah diatas, penulis menyimpulkan dalam beberapa topik pembahasan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan dasar adalah pendidikan diselenggarakan selama 9 tahun yaitu mencakup program belajar 6 tahun yang terlaksana di SD/MI dan lembaga pendidikan yang sederajat, kemudian program belajar 3 tahun yang diselenggarakan di SMP/MTSN dan lembaga pendidikan yang sederajat.
2. Macam-macam karakteristik lembaga pendidikan dasar di Indonesia berupa lembaga pendidikan dasar negeri dan swasta. Lembaga pendidikan dasar negeri merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan lembaga pendidikan swasta adalah lembaga pendidikan yang independen atau berdiri sendiri pemerintah tidak mengelola sekolah tersebut dan mereka memiliki wewenang sendiri.
3. Problem pendidikan dasar Islam yang terjadi saat ini adalah, Pengembangan pendidikan dasar lebih memprioritaskan pada aspek peningkatan sumber daya dan sarana prasana yang tujuannya untuk menampung peserta didik yang jumlahnya semakin meningkat dilihat dari angka partisipasi pendidikan, rendahnya mutu proses pengelolaan proses pembelajaran, perlakuan diskriminatif yang ditandai dengan pemberian anggaran sekolah yang tidak merata, sistem zonasi yang mengakibatkan beberapa sekolah kelebihan bahkan kekurangan peserta didik dan tidak ada lagi sekolah model atau sekolah yang menjadi panutan dan pengelolaan manajemen pendidikan yang kurang baik.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia dilakukan secara dualism, yakni Kemendikbud sebagai penyelenggara Pendidikan umum atau sekolah sedangkan Kemenag sebagai penyelenggara madrasah. Pada era Otonomi daerah pendidikan merupakan bidang yang termasuk dalam didesentralisasikan, maka konsekuensinya pengelolaan anggaran madrasah tetap terpusat hingga saat ini. Persoalan ini menjadikan kedudukan madrasah menjadi serba tanggung yang tetap dikelola oleh pusat, sementara sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kemendikbud didesentralisasikan pengelolaannya, dengan demikian madrasah tidak diperhitungkan oleh pemda kabupaten/kota karena dianggap pemerolehan dana telah didapatkan dari pemerintah pusat melalui jalur Kanwil dan Kandepag.

4. Relevansi setiap materi pokok yang ada pada Pendidikan dasar Islam harusnya secara keseluruhan ditata dengan rapi mulai dari hal-hal apa yang dibutuhkan

mengenai materi tersebut, sehingga Pendidikan dapat sesuai dengan perkembangan dan pembangunan zaman. Masalah relevansi problem pendidikan dasar Islam di Indonesia terlihat dari banyaknya lulusan dari suatu pendidikan tertentu tidak siap dalam secara kognitif maupu teknik.

5. Tematik merupakan usaha atau program pemerintah yang dapat merelevansikan problem pendidikan dasar Islam dengan materi pokok MI, dengan pembelajaran tematik problem pendidikan dasar dapat diminimalisir melalui kegiatan belajar yang dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, Dewi, “Problematika Guru Dari Aspek Ketersediaan Sarana Prasarana Menghadapi Era Standarnisasi Pendidikan Nasional,” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Mauhamadiyah Palembang*, Vol. 2, No.1 (2017).
- Arwildayanto, Sukung, Arifin, *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif*, (Jakarta: Cendikia Press, 2018).
- Ayu, Ni, Ajuman Zukhri, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar Di Kecamatan Gerugok Tahun 2012/2013, *Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.4, No. 1, (2014).
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Media Millennium III*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Eko Susanto, Yoyok, Perbedaan Persepsi Antara Siswa Sekolah Negeri Dan Swasta Terhadap Pembelajaran Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan (Studi Pada Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 1 Ngawi Dan SMP Ma’arif Ngawi),” *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan*, Vol.1, No. 1, (2013).
- Furchan, Arief, *Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia Anatomo Krbradaan Madrasah Dan PTAI*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004).
- Kemendikbud, *Rencana Strategi Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Periode 2010-2014*, (Jakarta: Secretariat Jenderal Kemendikbud, 2010).
- M Thalib, Razali Dan Irman Siswanto, “Inovasi Kurikulum Dalam Pengembangan Pendidikan (Suatu Analisis Implementatif),” *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, Vol. 1, No. 2 (2015).
- Musfah, Jijen, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Musrifah, Musrifah, “Analisis Kritis Permasalahan Pendidikan Islam Indonesia Di Era Global,” *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol. 3, No.1, (2019).
- Nahar. Syamsu, Edi Saputra, Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Pada Lemabaga Pendidikan Muhammadiyah Di Medaling Natal, *Edu Religia*, Vol.1, No. 3 (2017).
- Nurlailiyah, “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa Smp Di Yogyakarta,” *Realita*, Vol. 17, No. 1 (2019).

- Rahman, Asep, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (Penelitian Di Mtsa Syifaurrahman Tasikmalaya),” *Manzhim: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 2. (2019).
- Sanaky, “Permasalahan Dan Penataan Pendidikan Islam Menuju Pendidikan Yang Bermutu,” *El-Tarbawi*, Vol. 1, No. 1, (2018).
- Susilo, Joko, *Pembodohan Siswa Tersismatis*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2010).
- TIM PGRI, *Pendidika Untuk Tranformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan Untuk Perubahan Mental Bangsa*, (Jakarta: Kompas, 2014).
- UU SIDIKNAS dan UU BHP, “*Ringkasan Permohonan Pekara*,” di unduh dari <http://mkri.id/ondex.phd?page=download.resume&id=259> pada tanggal 21 Februari 2020.